



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

JSMP MENYAMBUT BAIK PENGUMUMAN TENTANG PENDIRIAN KOMISI AHLI (COMMISSION OF EXPERTS) OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Siaran Pers 22 Februari 2005

JSMP menyambut baik pengumuman dari Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pendirian Komisi Ahli (*Commission of Expert*) untuk meninjau kembali semua kasus-kasus kejahatan berat yang telah terjadi pada tahun 1999.

“Sangat diperlukan, dan sesegera mungkin mendatangkan Komisi ahli dalam waktu yang dekat”, demikian ungkapan yang didukung oleh para peserta dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh JSMP tentang “Keadilan bagi Timor Leste: Strategi Perencanaan Masyarakat Madani”. pada bulan September 2004 yang lalu. Para peserta dalam konferensi tersebut juga menekankan bahwa Komisi Ahli harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan internasional dengan memperhatikan pada kasus-kasus kejahatan internasional yang terjadi Timor Leste.

Beberapa NGO nasional, NGO internasional termasuk kalangan Pemerintahan dari beberapa Negara telah lama menyampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meninjau kembali kualitas dari Pengadilan Ad Hoc di Jakarta dan Pengadilan Khusus untuk Kejahatan Berat di Timor Leste. Kedua Pengadilan tersebut telah gagal menghadirkan para pelaku kejahatan berat untuk diadili.

Persidangan yang diselenggarakan di Jakarta dianggap oleh, baik NGO internasional maupun pemerintah (termasuk America) sebagai satu cara untuk menutupi kesalahan. Kenyataannya bahwa dari total hukuman yang dikeluarkan oleh pengadilan Jakarta telah diajukan ke pengadilan tinggi dan dua diantaranya sedang menunggu banding, ini menunjukkan bahwa proses ini tidak independen dan tidak netral.

Pengadilan PBB di Dili sampai sekarang telah mendakwa 72 orang yang melakukan pelanggaran pada tahun 1999, akan tetapi hampir semua hukuman yang jatuhkan itu kepada para anggota bawahan yang hanya terdiri dari orang Timor Leste yang berpangkat rendah. Para perwira tinggi militer yang telah didakwa, dan yang dituduh sebagai pelaku utama yang bertanggungjawab terhadap kekerasan, tetap berada di Indonesia dan berlindung dibalik dinding kekebalan. Apapun standar pengadilan Jakarta dan Dili, secara nyata mereka telah gagal untuk memenuhi tuntutan PBB yang tertera dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 bahwa “Mereka yang bertanggungjawab terhadap kekerasan tersebut harus diseret ke pengadilan”.

JSMP berharap bahwa Komisi Ahli yang akan memberi penilaian apakah persidangan-persidangan tersebut adil dan sesuai dengan standar hukum internasional. Jika Komisi Ahli menemukan bahwa persidangan tersebut telah gagal memenuhi standar internasional, maka masyarakat internasional memiliki kewajiban

untuk menjamin bahwa para pelaku kejahatan harus diadili di muka pengadilan yang mana sesuai dengan standar internasional.

JSMP akan memberikan beberapa tulisan dan komentar individu kepada Komisi Ahli. Tulisan dan komentar individu tersebut diperoleh dari sebuah Konferensi yang diselenggarakan pada bulan September 2004 mengenai "Keadilan bagi Timor Leste: Strategi Perencanaan Masyarakat Madani". JSMP juga mau membantu Komisi Ahli dengan memberikan informasi dan dokumen lain yang dianggap relevan dengan Komisi Penyelidikan secara khusus.

Kami berharap bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor Leste akan bekerjasama secara penuh dengan Komisi Ahli agar Komisi ini dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Ahli dapat bermanfaat bagi rencana Pemerintah Indonesia dan Timor Leste mengenai pembentukan "Komisi Kebenaran dan Persahabatan". Akan tetapi JSMP ingin mengulangi kembali pandangannya bahwa "Komisi Kebenaran dan Persahabatan" dapat bertentangan dengan Konstitusi Timor Leste dan kelihatannya bermaksud untuk melindungi para pelaku utama yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap masyarakat Timor Leste tidak akan pernah untuk bertanggungjawab terhadap kejahatan yang mereka lakukan.